

Analisis yuridis terhadap dugaan pelanggaran pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 berkaitan dengan pekerjaan peningkatan jalan pada satuan kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara: putusan KPPU nomor 01/KPPU-L/2016 = Juridicial analysis of the allegation of violation pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999, case study: verdict number 01/KPPU-L/2016

Mohammad Yusuf Rashidi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20458912&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRACT

Skripsi ini memberikan analisis terhadap putusan KPPU No.01/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan memberikan penjelasan mengenai pengaturan persekongkolan tender di dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan membahas mengenai kesesuaian penggunaan alat bukti oleh KPPU dalam pembuktian perkara persekongkolan tender ini dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memberikan analisis mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam pemenuhan unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menggunakan pendekatan rule of reason dalam membuktikan terjadinya praktik persekongkolan tender. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil skripsi ini melihat bahwa penggunaan alat bukti oleh KPPU dalam pembuktian praktik persekongkolan tender tidak sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan putusan majelis yang membenarkan hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku baik itu Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maupun PERKOM No. 1 tahun 2010 yang dimana kedua undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya penggunaan indirect evidence dalam pembuktian persekongkolan tender.

<hr>

ABSTRACT

This thesis provides the analysis of the Allegation of violation Article 22 Law Number 5 of 1999 by giving an explanation of the regulation of tender collusion that uses the rule of reason approach in Indonesia's Antitrust Law. This thesis also provides the analysis of using indirect evidence prior to the vindication by KPPU according to the Article 42 Law Number 5 of 1999. This thesis uses normative juridical approach, which some of the data are based on related literatures. The result of this thesis is the using of indirect evidence as the evidence for a verdict and the judges ruling that justifies the using of indirect evidence are not based on the regulation of the law. Article 42 Law Number 5 of 1999 and the Commission Law Number 1 of 2010 does not state that indirect evidence is included to the all the evidence list that the law provides.